

Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tahun 2021 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah Di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Implementation Of District Head Circular Letter No. Lh.15.01/629.1 Year 2021 Regarding The Forced Segregation Of Waste From Home Program In Banjarsari District, Surakarta City

Rois Al Afif Al Hafidz

(Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Winarti, M.Si dan Dra. Damayanti Suhita, M.Si)

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

roisalafif18@gmail.com

ABSTRAK

Collaborative Governance Sampah menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh seluruh daerah, karena sifatnya yang sulit diurai dan mudah merusak lingkungan sehingga Kecamatan banjarsari membuat inovasi program yang tertuang dalam Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tahun 2021 Tentang Program Paksa Pilah Sampah dari Rumah (Papi Sarimah) dan untuk menghasilkan program yang baik, maka sangat penting untuk diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tahun 2021 Tentang Program Paksa Pilah Sampah dari Rumah (Papi Sarimah) di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Berdasarkan judul yang disajikan diatas maka dapat dilihat Bagaimana Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah (Papi Sarimah) dalam mengelola sampah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan Indikator Implementasi dari Van Meter Dan Van Horn (1975: 463) yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Selain itu. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan menggunakan model miles, Huberman, dan saldana yaitu dengan cara (1) Pengumpulan Data, (2) Kondensasi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan dan mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu dapat disimpulkan bahwa Implementasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Banjarsari dalam melaksanakan program Papi Sarimah terlaksana dengan baik, hal ini ditandakan dengan keberhasilannya pelaksanaannya program Papi Sarimah di sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari. Antar petugas pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Adapun rekomendasi dari peneliti antara lain Aparatur Pemerintah Kecamatan Banjarsari dalam program Papi Sarimah dapat meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan memberikan waktu atau pertemuan khusus untuk masyarakat sehingga dapat meminimalisir ketidak tahuan

dalam pelaksanaan program Papi Sarimah. Selain itu Pemerintah Kecamatan Banjarsari hendaknya mengupayakan menyediakan tempat khusus untuk pemilahan sampah yang tersedia di setiap Kelurahan

Kata Kunci: Implementasi, Program, Papi Sarimah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISTRICT HEAD CIRCULAR LETTER NO. LH.15.01/629.1 YEAR 2021 REGARDING THE FORCED SEGREGATION OF WASTE FROM HOME PROGRAM IN BANJARSARI DISTRICT, SURAKARTA CITY.

Garbage is a problem that is often faced by all regions because it is difficult to decompose and easily damages the environment. Hence, the Banjarsari District makes program innovations contained in the District Head Circular Letter No. Lh.15.01/629.1 of 2021 Regarding The Forced Segregation of Waste from Home (Papi Sarimah) Program and implementing its good program is very important. This study aims to describe and analyze the Implementation of District Head Circular No. Lh.15.01/629.1 of 2021 Regarding The Forced Segregation of Waste from Home (Papi Sarimah) Program in Banjarsari District, Surakarta City. Based on the title presented above, it can be seen how the Implementation of District Head Circular No. Lh.15.01/629.1 Regarding The Forced Segregation of Waste from Home (Papi Sarimah) Program in managing waste in Banjarsari District, Surakarta City. This study uses Implementation Indicators from Van Meter and Van Horn (1975: 463), namely Policy Size and Objectives, Resources, Interorganizational Communication and Implementing Activities, Characteristics of Executing Agencies, Attitudes/Tendencies (Disposition) of implementers, Economic Environment, Social, and Political. In addition, this research is descriptive in nature with qualitative data analysis using the Miles, Huberman, and Saldana models, namely by (1) Data Collection, (2) Data Condensation, (3) Data Presentation, and (4) Drawing Conclusions and collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. Based on the research that researchers have done, it can be concluded that the implementation carried out by the Banjarsari District Government in carrying out the Papi Sarimah program was carried out well; the successful implementation of the Papi Sarimah program in parts of the Banjarsari District indicated this. Between implementing, officers carry out their duties under their respective duties and responsibilities. The recommendations from researchers include Banjarsari District Government officials in the Papi Sarimah program being able to increase direct outreach to the community and provide particular times or meetings for the community to minimize ignorance in implementing the Papi Sarimah program. Besides that, the Banjarsari District Government should offer a special place for sorting waste in each district.

Keywords: Implementation, Program, Papi Sarimah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan dalam masalah lingkungan yang sering dihadapi oleh seluruh Negara di dunia. Baik di Negara-negara berkembang, maupun di Negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Karena sifatnya yang sulit diurai dan mudah merusak lingkungan, namun keberadaannya kian bertambah setiap tahunnya. Umumnya Negara dengan wilayah yang besar dan padat penduduknya cenderung menghasilkan lebih banyak sampah secara keseluruhan. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan. Dengan bertambah besarnya jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia mengakibatkan volume sampah meningkat pesat, terutama di wilayah perkotaan. Berbagai tempat di kota-kota seperti pasar dan kawasan publik, sampah yang menumpuk dan berbau seakan menjadi hal lumrah dan sangat sering ditemui. Hal ini disebabkan padatnya penduduk dibandingkan pedesaan, kegiatan perekonomian, pola konsumsi, aktivitas serta perilaku masyarakat, dan masalah perkotaan lainnya.

Di Indonesia rata - rata penghasilan sampah per tahun mencapai ribuan bahkan puluhan ton. Melainsir dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat total sampah nasional pada tahun 2022 mencapai 70 juta ton, jumlah itu naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 68,5 juta ton.

Indonesia menempati urutan penghasil sampah terbanyak ketiga di Asia dan peringkat kelima di Dunia. Sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi sampah yang kian bertambah dan menumpuk disetiap tahunnya.

Berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mengatasi masalah sampah. Pemerintah sudah meningkatkan upaya menangani sampah ini. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah ini, Salah satu kebijakan tersebut pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan Indonesia biasanya dibuang ke tempat sampah dan kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Kecamatan banjarsari yang menjadi lokus dari penelitian ini, merupakan salah satu kecamatan terbesar yang ada di Kota Surakarta, dengan luas wilayah sebesar 14,81 km², terdiri dari 15 kelurahan dan 195 rukun tetangga dengan total penduduk 168 ribu jiwa. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, kekhawatiran

Kecamatan Banjarsari adalah sampah yang dihasilkan masyarakatnya, hal itu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah di Kecamatan Banjarsari. Selaras penelitian terahulu oleh Paramita Adhinul Putera dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan.

Menurut informasi Camat Kecamatan Banjarsari yang ditemui oleh peneliti pada tanggal 23 Januari 2023, jumlah timbangan sampah di TPA Kecamatan Banjarsari Pada tahun 2021 (diagram merah) rata-rata timbangan sampah Kecamatan Banjarsari mencapai 2.5 juta ton pertahunnya. Sebagai upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat dari sampah yang menyebabkan permasalahan berkepanjangan, maka Kecamatan Banjarsari melakukan pengaturan sistem pengelolaan sampah dimulai dari rumah dan dilaksanakan serentak di Kelurahan se-Kecamatan Banjarsari. Berawal dari sebuah permasalahan bahwa, memilah sampah menjadi bagian yang harus dilakukan. Tetapi pada kenyataan pilah sampah ini belum sepenuhnya dilakukan, sehingga Kecamatan Banjarsari membuat semacam inovasi berupa program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah (Papi Sarimah) yang tertuang dalam Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1. Program ini bertujuan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, kemudian memaksa agar

sampah bisa terpilah dari rumah. Sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, rapih dan tidak meninggalkan aspek yang dibutuhkan masyarakat saat ini yaitu adalah peningkatan ekonomi. Sampah yang dipilah yakni sampah organik dan anorganik. Dari sampah organik yang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman dan sampah anorganik yang bisa dijadikan hiasan dan memiliki nilai jual, selain dapat membuat lingkungan bersih dan subur sampah juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi hal tersebut belum berjalan sempurna, karena sampah organik dan sampah anorganik masih banyak yang terbuang dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan mengelola sampah masih kurang.

Mengatasi permasalahan persampahan ini sebagai faktor yang menentukan kebersihan lingkungan, Pemerintah Kecamatan tidak bekerja sendiri namun melibatkan dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama. Yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program dalam pengelolaan sampah yang bertujuan melestarikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk menghasilkan suatu pelaksanaan program yang baik, maka perlu adanya suatu implementasi. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kecamatan banjarsari peneliti tertarik untuk meneliti

Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah (Papi Sarimah) dalam mengelola sampah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah (Papi Sarimah) di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Syafiie 2006: 105) "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)". Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Alasan mengapa kebijakan harus dilakukan atau tidak dilakukan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintah memilih untuk melakukan suatu kebijakan ketika dirasa dengan kebijakan tersebut akan membawa manfaat dan perubahan yang besar bagi masyarakat. Sedangkan pemerintah

memilih diam atau tidak melakukan apapun apabila merasa pada saat hal tersebut dilakukan maka hanya akan memberikan manfaat bagi sedikit orang atau walaupun hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan kerugian apapun.

Selanjutnya suatu kebijakan dipandang dapat memberikan arah dan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh James E. Anderson Anderson (dalam Winarno 2007: 18) menyatakan bahwa "kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan". Konsep kebijakan ini dianggap tepat oleh Winarno karena dapat memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh aktor dan bukan hanya sekedar pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Maka sebelum ditetapkannya suatu tindakan untuk mengatasi masalah, terlebih dahulu pemerintah mengumpulkan informasi sebab - akibat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari adanya beberapa definisi terkait kebijakan publik di atas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan tertentu yang diambil pemerintah untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya sudah dipilih dan ditetapkan bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada.

B. Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut pernyataan Edward III (dalam Winarno 2014:147) "Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program". Sedangkan Lester dan Stewart (2014:147) berpendapat bahwa "Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome)". Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan.

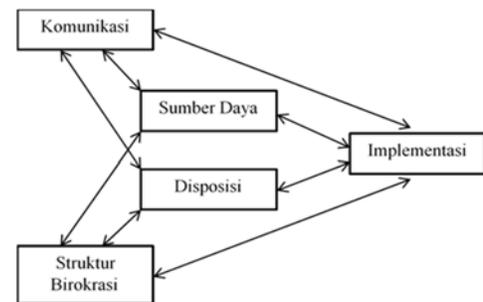
Implementasi dapat dipahami sebagai langkah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagaimana yang disampaikan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:102) Membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud meliputi tindakan operasional yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Dari berbagai pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses terdiri dari serangkaian tindakan untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (output) yang disusun oleh pejabat pemerintah dan telah disahkan sebelumnya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

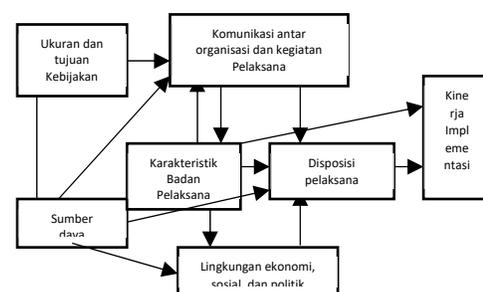
C. Model-model Implementasi

1. Model George C. Edwards III



Agar implementasi kebijakan dapat sukses dilaksanakan maka ada empat variabel yang harus diperhatikan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

2. Model Van Meter dan Van Horn



Variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja adalah sebagai berikut: Standard dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, Disposisi implementor

3. Model Grindle

Grindle merumuskan dua model implementasi yaitu muatan kebijakan yang dimaksud meliputi dan konteks implementasi.

Muatan kebijakan meliputi:

a)Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan; b)Jenis manfaat yang dihasilkan; c)Derajat perubahan yang diinginkan; d)Kedudukan pembuat kebijakan; e)Para pelaksana program; f)Sumber daya yang dikerahkan

Konteks implementasi berikut:

a)Kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat; b)Karakteristik lembaga dan penguasa; c)Kepatuhan dan daya tanggap pelaksanaan;

D. Program Papi Sarimah

Sebagai upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat dari sampah yang menyebabkan permasalahan berkepanjangan, maka Kecamatan Banjarsari melakukan pengaturan sistem pengelolaan sampah dimulai dari rumah dan dilaksanakan serentak di Kelurahan se-Kecamatan Banjarsari.

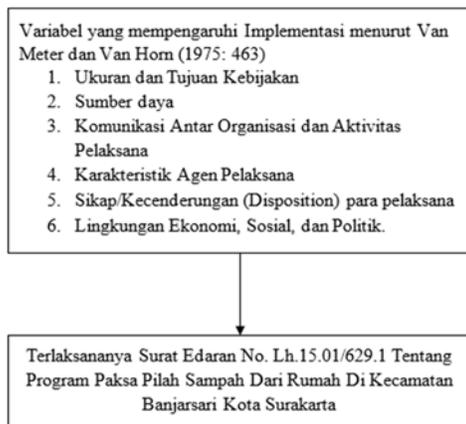
Berawal dari sebuah permasalahan bahwa, memilah sampah menjadi bagian yang harus dilakukan. Tetapi pada kenyataan pilah sampah ini

belum sepenuhnya dilakukan, sehingga Kecamatan Banjarsari membuat semacam inovasi paksa pilah sampah dari rumah (Papi Sarimah). Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapih dan tidak meninggalkan aspek yang dibutuhkan masyarakat saat ini yaitu adalah peningkatan ekonomi. Adapun alur kegiatan Papi Sarimah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sampah rumah tangga wajib dipilah atau dipisahkan sesuai jenis sampahnya, yakni sampah daur ulang (plastic, logam, kain, botol, kertas) dan sampah yang tidak dapat didaur ulang (sayuran, buah, popok).
- 2) Sampah harus dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berbeda.
- 3) Kegiatan pilah sampah wajib dilakukan setiap hari secara mandiri oleh masing-masing warga Banjarsari, Solo.
- 4) Apabila pilah sampah dari rumah tidak dilakukan, hak mendapatkan pelayanan sampah oleh kelurahan tidak dilakukan alias petugas tidak mengambil sampah.
- 5) Sampah daur ulang hasil pilihan dapat disalurkan kepada bank sampah setempat.

Berdasarkan teori teori dari Van Meter dan Van Horn tentang bagaimana indikator implementasi suatu kebijakan diukur (1975: 463), maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah (Papi Sarimah) di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif berdasarkan fakta - fakta yang tampak (Sugiyono, 2018: 9).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan yang ada di kota Surakarta, yaitu di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kecamatan Banjarsari dipilih karena merupakan Kecamatan terluas yang ada di Kota Surakarta dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga

berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah di Kecamatan Banjarsari dan ada beberapa masalah didalam program Papi Sarimah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari rumah, kurangnya sosialisasi dan konsistensi dari perangkat daerah mengenai program Papi Sarimah. Untuk itu peneliti meneliti mengenai Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tahun 2022 Tentang Program Paksa Pilah Sampah Dari Rumah Di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

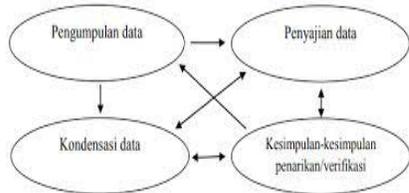
Menurut Sugiono (2018:224) pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapat data yang ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori dari Miles Huberman dan Saldana (2014:14) yaitu menganalisis data dengan menggunakan empat tahapan atau empat langkah yaitu: Pengumpulan Data, kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Secara skematis proses analisis interaktif ini

dapat digambarkan sebagai bagan berikut:

Gambar 2. Metode Penelitian



(Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014:14))

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mendiskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai di Kantor Kepala Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Meter dan Van Horn (1975: 463): Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan para pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi dapat diukur dari tujuan dan sasaran program. Sesuai hasil penelitian yang peneliti lakukan dilihat dari segi tujuan bahwa

program Papi Sarimah memiliki tujuan utama yaitu menandakan kembali aturan pemerintah pusat diimplementasikan dengan cara dipaksa sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ada di TPA kemudian lebih menjaga kepada lingkungan, karena memilah sampah organik dan non organik dapat membantu petugas dalam mengelola sampah serta menyadarkan masyarakat bahwa sampah bisa memberikan nilai ekonomi. Dari segi sasaran bahwa sasaran program Papi Sarimah adalah untuk seluruh rumah tangga yang terdiri dari 15 Kelurahan dan semua masyarakat Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

2. Sumber Daya

Implementasi diukur dari sumber daya yang meliputi pegawai yang bertugas, dana yang digunakan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dari segi pegawai yang bertugas untuk melaksanakan program Papi Sarimah sudah sesuai memiliki kemampuan yang cukup, walaupun Petugas Sampah tidak ada syarat

atau keahlian khusus hanya berupa Ijazah Sekolah sudah mendapat kontrak kerja, namun kinerja dari petugas sudah bagus, total petugas sampah se-kecamatan Banjarsari ada 246 petugas dan tersebar di masing-masing Kelurahan. Dari segi dana, sumber dana khusus yang secara langsung digunakan untuk pelaksanaan program Papi Sarimah tidak ada, karena merupakan program untuk mengurangi jumlah timbulan sampah di TPA yang hadir tanpa merubah kebiasaan lama yaitu membayar Petugas Sampah dan regulasinya tidak membutuhkan biaya, dari masyarakat terdapat iuran sebesar 5-10 ribu setiap bulanya untuk membayar petugas sampah. Dari segi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Papi Sarimah cukup memadai antara lain tong sampah dan plastik sampah disediakan secara mandiri oleh masyarakat, kemudian grobak motor yang tersebar di masing - masing Kelurahan minimal 2 unit, namun terkendala di lahan atau tempat pemilihan sampah.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi diukur dari komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana meliputi sosialisasi, pihak-pihak yang terlibat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Dari segi sosialisasi, masyarakat sudah menerima informasi tentang program Papi Sarimah baik melalui media maupun perkumpulan warga yang tersebar di masing-masing daerah, dilakukan Kecamatan melalui petugas sampah secara dor to dor, kemudian Kelurahan, RT/RW serta melalui ibu-ibu PKK. Dari segi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Papi Sarimah yaitu Petugas sampah, kemudian Kasi Pembangunan, Kelurahan, Kecamatan dan forum-forum RT/RW serta ibu-ibu PKK. Dari segi monitoring dan evaluasi pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik, adapun bentuk hasil evaluasinya dari sisi masyarakat masih ada yang tidak milah sampah tapi tetap diambil petugas sampah,

begitupun sebaliknya ketika masyarakatnya sudah milah petugasnya justru mencampur adukan sampahnya ke dalam bak menjadi satu.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi diukur dari karakteristik agen pelaksana yang meliputi sikap petugas terhadap peraturan, sikap petugas dalam pelaksanaan, kendala atau keluhan masyarakat terhadap sikap petugas. Dari segi sikap petugas terhadap peraturan, khususnya petugas sampah sudah taat dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan insturksi Pemerintah Kecamatan yang ada pada program Papi Sarimah dan tertuang dalam Surat Edaran. Dari segi sikap petugas sampah dalam melaksanakan program Papi Sarimah sudah bagus dan semangat karena dengan adanya program ini membantu petugas sampah dalam memilah sampah serta terdapat nilai ekonomi didalamnya. Dari segi kendala atau keluhan masyarakat terhadap sikap

petugas yaitu warga merasa sudah membayar RAK untuk iuran kebersihan namun terdapat sanksi jika tidak dipisah berupa tidak diambilnya sampah warga oleh petugas. Kemudian jika petugas sampah keduluan dengan pemulung sampah ada kemungkinan sampah diberantakin karena yang diambil barang-barangnya saja dan sisahnya dibiarkan begitu saja.

5. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pelaksana

Implementasi diukur dari Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pelaksana meliputi pandangan terhadap pelaksanaan program, dan hal yang perlu dibenahi. Dari segi pandangan terhadap pelaksanaan program dapat dilihat bahwa kehadiran program Papi Sarimah dinilai memberikan dampak positif dan sudah bisa diterapkan di masing-masing kecamatan karena dapat mengedukasi masyarakat untuk pemanfaatan sampah serta memberikan pemasukan ekonomi walaupun kecil, selain itu

memberikan dampak terhadap pengurangan sampah. Dari segi hal yang perlu dibenahi dari program Papi Sarimah antara lain petugas perlu menyediakan kantong sampah yang berbeda untuk sampah kering dan sampah basah agar lebih rapih, belum adanya kebijakan yang membawahi seperti Undang-undang, dari sosialisasinya perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak kecamatan secara langsung, mengadakan lomba dan memberikan reward atau hadiah sehingga masyarakat semangat untuk melaksanakan program Papi Sarimah, selain itu pembinaan petugas perlu pengawasan lebih dari Kasi sehingga evaluasi dapat dilakukan secara rutin di masing-masing Kasi Kelurahan setiap bulannya kemudian dikumpulkan hasil evaluasi ke Kecamatan.

6. Lingkungan ekonomi, Sosial, dan Politik

Implementasi diukur dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik meliputi kondisi sosial

ekonomi masyarakat, dan tingkat partisipasi politik. Dari segi sosial ekonomi masyarakat, Dengan adanya program Papi Sarimah masyarakat lebih perhatian dengan kebersihan, dari segi ekonominya ada karena ketika menjualnya di bank sampah dapat menghasilkan uang dan minset cara berfikir mereka termasuk perilaku mereka sudah berubah dengan adanya program Papi Sarimah ini. Dari segi tingkat partisipasi politik memiliki peran penting dalam berjalannya program Papi Sarimah. Adapun bentuk partisipasi politik dari masyarakat, salah satunya CSR politik kemudian masyarakat yang awalnya dipaksa namun tetap melaksanakan program Papi Sarimah merupakan stakeholder utama atau primer terbesar, yang jika stakeholder tersebut tidak ada maka program Papi Sarimah tidak akan berjalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Surat Edaran Camat No. Lh.15.01/629.1 Tentang Program Paksa Pilah Sampah

Dari Rumah (Papi Sarimah) di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yang menggunakan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik serta yang terakhir adalah kecenderungan dari pelaksana. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Yang indikatornya adalah sasaran dan tujuan program Papi Sarimah yaitu untuk masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Sumber daya kebijakan juga sudah baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Yang indikatornya antara lain darimana sumber dana, sarana dan prasarana, serta pegawai yang menunjang keberhasilan program Papi Sarimah. Untuk dana program Papi Sarimah tidak ada hal ini dikarenakan reguasi program Papi Sarimah tidak membutuhkan biaya hanya kebiasaan pengambilan sampah yang kemudian diatur. Kemudian sarana dan prasarana program Papi Sarimah sudah cukup yaitu tong sampah yang disediakan secara mandiri oleh masing-masing rumah tangga dan gerobak motor yang tersedia di setiap Kelurahan, walaupun untuk tempat pemilahan masih kurang. Kemudian

petugas lapangan sudah memiliki kemampuan yang cukup walaupun tidak ada syarat khusus untuk latar belakang pendidikan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang indikator penelitiannya antara lain bagaimana sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta siapa saja yang terlibat. Sosialisasi program Papi Sarimah sudah dilakukan melalui media sosial, RT/RW setempat, dan dor to dor oleh Petugas Sampah. Untuk monitoring dan evaluasi juga sudah dilakukan baik di tingkat Kelurahan dan Kecamatan hasilnya beberapa dari masyarakat dan petugas mengadakan masalahnya dan sudah di tindak. Adapun yang terlibat dalam Program Papi Sarimah adalah Camat, Seksi Pembangunan, Petugas Sampah, RT/RW serta partisipasi Masyarakat.

4. Karakteristik agen pelaksana pun sudah baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang diantaranya ada beberapa indikator penelitian yakni bagaimana petugas menyikapi peraturan yang dibuat, sikap petugas serta keluhan masyarakat terhadap petugas dalam melaksanakan program Papi Sarimah. Dari petugas sudah taat dengan instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan yaitu mengambil sampah yang sudah dipilah. Sikap para petugas juga baik. Dibuktikan dengan pernyataan dari masyarakat yang menilai petugas sudah sesuai dengan tugasnya yaitu mengambil sampah.

5. Kecenderungan agen pelaksana juga sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi adapun indikatornya antara lain pandangannya terhadap program Papi Sarimah, dan hal apa yang perlu di benahi. Sikap para pelaksana sangat mendukung kelancaran program Papi Sarimah agar lebih baik lagi. Hal ini dapat dilihat dari indikator pandangan mereka terhadap program Papi Sarimah yang dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Adapun kendala yang dihadapi adalah mengenai kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melaksanakan program Papi Sarimah. Sehingga Pemerintah Kecamatan perlu melakukan evaluasi rutin untuk membenahi kendala tersebut dan mengingatkannya kembali.

6. Faktor eksternal seperti sosial, ekonomi dan politik juga baik. Dibuktikan dengan adanya indikator penelitian yakni sejauh mana kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh program Papi Sarimah, serta bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat. program Papi Sarimah memberikan peningkatan ekonomi dari sektor menjual sampah walaupun tidak signifikan. Dari segi sosial minset atau cara berfikir termasuk perilaku masyarakat sudah berubah dengan adanya program Papi Sarimah, hal ini dibuktikan dengan kepedulian masyarakat secara lebih terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian dari segi partisipasi politik masyarakat merupakan stakeholder utama atau primer terbesar dalam pelaksanaan program Papi Sarimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fiter. 2018. "Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu". Universitas Bengkulu.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <https://sipsn.menlhk.go.id/> diakses pada Selasa, 18 Oktober 2022
- Jones O. Charles, 1994, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: Manajemen PR Raja Grafindo Persada.
- Meliani, Intan. 2020. "Implementasi Pengelolaan Sampah Melalui Program Persatuan Angkutan Sampah". Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

- Ponto, Audrin. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. 3 (20): 41-44.
- Putera, Paramita Adhinul. 2016. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". Universitas Terbuka Jakarta.
- Samodra, W. (1994) Kebijakan Publik:Proses dan Analisis, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta.
- Surat Edaran Camat No. LH.15.01/629.1 tentang Program Paksa Pilah Sampah dari Rumah (Papi Sarimah).
- Sutopo, H.B. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. N. (2003). Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Jakarta, Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2007. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Kita.